

## **Indeks Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa**

**Binar Dwiyanto Pamungkas<sup>1\*</sup>, Elly Karmeli<sup>1</sup>, Kamaruddin<sup>2</sup>, Asmini<sup>3</sup>, Ayati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ekonomi Pembangunan/Universitas Samawa, Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Keuangan Perbankan/Universitas Samawa, Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

<sup>3</sup>Manajemen/Universitas Samawa, Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : binardwiyanto@universitas-samawa.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa indeks inovasi sistem pengelolaan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Sumbawa. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang menggambarkan suatu perubahan di dalam pengukuran indeks inovasi. Penelitian ini menggunakan variabel mandiri dalam hal ini adalah sistem pengelolaan keuangan. Hasil dari pengukuran indeks inovasi menggunakan 4 indikator yaitu kebaruan, produktif, berdampak dan berkelanjutan. Dari pengelolaan data yang dilakukan dengan hasil perhitungan indeks inovasi sebesar 83,07%. Kesimpulan dari analisis Indeks inovasi sistem pengelolaan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator yaitu kebaruan, produktif, berdampak, dan berkelanjutan. Dan dengan formula perhitungan mencakup dua aspek yaitu aspek output dan aspek outcome dengan adanya indeks inovasi ini dapat mengetahui seberapa besar inovasi yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan.

Kata kunci: Indeks Inovasi, Sistem Pengelolaan Keuangan.

### **PENDAHULUAN**

Adanya desentralisasi pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah mampu memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak termasuk seluruh masyarakat sehingga tujuan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah sebagai fasilitator akan terwujud karena pemerintah yang lebih mengetahui sasaran, arah, dan tujuan yang ingin dicapai.

Secara hirarki semangat dan dorongan berinovasi berawal dari kebijakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 386, 387 dan pasal 388 yang menjelaskan perlu adanya inisiatif untuk berinovasi oleh seluruh komponen pemerintah daerah (kepala daerah, OPD, DPRD) bahkan lapisan masyarakat. Inovasi juga menjadi program prioritas melalui Nawacita Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pasal 19 menyebutkan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemda, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah/masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka diharuskan kepada pemerintah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintah lebih berhasil guna, dan berdaya guna bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi Keuangan terhadap publik, selain itu untuk mewujudkan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Transparan Dan Akuntabel, beberapa langkah yang harus ditempuh, diantaranya meningkatkan sistem pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang transparan dan profesional, meningkatkan layanan penatausahaan keuangan yang akuntabel, meningkatkan kualitas penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah yang berbasis standar akuntansi pemerintah, serta meningkatkan penataan dan pengelolaan aset daerah efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan inovasi berkaitan dengan system pengelolaan keuangan. Anas (2017) menyatakan inovasi pengelolaan anggaran telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi memanfaatkan teknologi informasi yang bisa diakses secara luas. Penerapan Inovasi Daerah diperlukan serangkaian tahapan yang sistematis, terukur dan berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh komponen baik dari pemerintah, sektor swasta dan seluruh lapisan masyarakat Untuk mencapai efektivitas dalam penerapannya. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa perlu Untuk mengukur tingkat keberhasilan inovasi system pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, untuk itu perlu dilakukan kajian indeks inovasi system pengelolaan keuangan daerah ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menggambarkan mengenai obyek penelitian secara lengkap, agar jelas keadaan atau kondisi obyek tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara tepat sesuatu yang tengah terjadi dan berlangsung pada penelitian.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data meliputi: persepsi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa tentang dimensi kebaruan, produktif, berdampak, berkelanjutan inovasi yang diterapkan.

### **Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 77 karyawan. Dengan menggunakan Rumus Slovin dalam pelaksanaan penelitian ini diambil yaitu Diketahui populasi (N) 77, eror (e) 5%  $(0,05)^2$ .  $77/1+77(0,05)^2 = 64,54$  atau dapat di bulatkan menjadi 65 sampel .

### **Teknik Analisis Data**

Dalam pengukuran indeks persepsi inovasi ini dengan menggunakan skala likert 1-10 dengan tujuan agar responden memiliki keleluasaan dalam mempersepsikan kualitas dan manfaat inovasi. Pada skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari rentang yang tersedia.

Suprihartini, dkk. (2017) berpendapat bahwa instrumen pengukuran indeks persepsi inovasi dibangun berdasarkan kerangka pikir yang mengelaborasi konsep - konsep inovasi, kebijakan, model

pengukuran kinerja. Dari hasil elaborasi tersebut menghasilkan konstruksi instrumen yang mencakup aspek yang terdiri dari output dan outcome. Selanjutnya aspek dijabarkan kedalam empat dimensi yaitu kebaruan, produktif, berdampak, berkelanjutan. Keempat dimensi ini dijabarkan menjadi 23 indikator. Aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Dalam pengukuran indeks ini aspek mencakup dua hal yaitu output dan outcome. Output adalah hasil dari aktifitas atau kegiatan dari inovasi, yang dapat langsung dirasakan, dilihat dan dibuktikan oleh pengguna layanan. Outcome adalah Dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan inovasi yang diperoleh/diterima pengguna layanan. Penghitungan indeks persepsi inovasi dilakukan dengan cara menghitung nilai indeks persepsi inovasi sesuai dengan konstruksi instrument sebagaimana tersebut di atas dengan formula atau rumus sebagai berikut :

$$i = \frac{(50\% (S_{X1}) + 50\%(S_{X2})) \times 100}{10}$$

atau

$$i = 10 \left( \frac{1}{2} S_{X1} + \frac{1}{2} S_{X2} \right)$$

**Dimana :**

i = Nilai indeks persepsi inovasi

$S_{X1}$  = Nilai Aspek Output

$S_{X2}$  = Nilai Aspek Outcome

Aspek *output* Terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi kebaruan dan dimensi produktif, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$S_{X1} = \frac{(60 (S_{X1.1}) + 40(S_{X1.2}))}{100}$$

**Dimana :**

$S_{X1.1}$  = Dimensi Kebaruan

$S_{X1.2}$  = Dimensi Produktif

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, Dalam hal ini Dimensi Kebaruan memiliki 8 indikator dan Dimensi Produktif memiliki 5 indikator. sehingga perhitungan tiap tiap dimensi adalah sebagai berikut:

$$S_{X1.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

**Dimana:**

$S_{X1.n}$  = Nilai tiap indikator pada aspek output;

$Sind_y$  = Indikator

y = Jumlah indikator

Aspek *Outcome* Terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi berdampak dan dimensi ada bukti inovasi, sehingga rumus perhitungan Aspek *Outcome* adalah sebagai berikut:

$$S_{X2} = \frac{(50 (S_{X2.1}) + 50(S_{X2.2}))}{100}$$

$S_{X2.1}$  = Dimensi berdampak;

$S_{X2.2}$  = Dimensi ada bukti inovasi

Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri, Dalam hal ini Dimensi Berdampak memiliki empat indikator dan Dimensi Bukti memiliki enam indikator. sehingga perhitungan tiap tiap dimensi adalah sebagai berikut:

$$S_{X2.n} = \frac{Sind_1 + \dots + Sind_y}{y}$$

**Dimana:**

$S_{X2.n}$  = Nilai tiap indikator pada aspek outcome;

$Sind_y$  = Indikator

$y$  = Jumlah indicator

Tabel 1 Skala Indeks Inovasi

| No | KETERANGAN            | RENTANG NILAI  |
|----|-----------------------|----------------|
| 1  | Excellent innovation  | 91,01 - 100.00 |
| 2  | Sangat inovatif       | 82,01 - 91.00  |
| 3  | Inovatif              | 73,01 - 82.00  |
| 4  | Cukup Inovatif        | 64,01 - 73.00  |
| 5  | Biasa                 | 55,01 - 64.00  |
| 6  | Kurang Inovatif       | 46,01 - 55.00  |
| 7  | Tidak inovatif        | 37,01 - 46.00  |
| 8  | Sangat tidak inovatif | 28,01 - 37.00  |
| 9  | Inovasi Buruk         | 19,01 - 28.00  |
| 10 | Inovasi Sangat Buruk  | 10,00 - 19.00  |

## HASIL

Dari tabel dibawah dapat di jelaskan bahwa masing-masing dimensi mempunyai total skor yaitu dimensi kebaruan memiliki total skor sebesar 8,382, dimensi produktif memiliki total skor sebesar 8,522, dimensi berdampak memiliki total skor sebesar 8,030, dan indikator berkelanjutan memiliki total skor sebesar 8,397.

Tabel 2 Rekapitulasi Total Jawaban Responden Terhadap 4 Dimensi

| Indikator     | skor  |
|---------------|-------|
| Kebaruan      | 8,382 |
| Produktif     | 8,522 |
| Berdampak     | 8,030 |
| Berkelanjutan | 8,397 |

Sumber data : data primer diolah

Dari hasil perhitungan formula indeks yang di gabungkan dari kedua aspek yaitu aspek output dan aspek outcome yaitu sebesar 83,07 %. Jadi dapat di simpulkan bahwa Indeks Inovasi Sistem Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa termasuk dalam skala penilain sangat inovatif.

## PEMBAHASAN

Berikutnya berdasarkan hasil indeks inovasi system pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa sebesar 83,07% dengan kriteria sangat inovatif. Namun masih terdapat indikator-indikator yang tergolong cukup inovatif yaitu ketersediaan sarana dan prasarana inovasi secara inklusif dan peran swasta dalam peningkatan proses dan kualitas inovasi. Belum optimalnya indikator-indikator ini disebabkan beberapa hal antara lain belum ada formulasi khusus tentang penerapan inovasi system pengelolaan keuangan, belum ada regulasi tingkat daerah yang mengatur tentang adanya pelibatan sektor swasta maupun masyarakat dalam system pengelolaan keuangan, dan keterbatasan anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana inovasi (Maggasingang, 2010).

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan Narutomo (2014) Nilai tambah dapat diperoleh dalam Penguatan inovasi daerah yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dan juga pihak swasta, akademisi serta birokrasi pemerintah itu sendiri, untuk saling bahu membahu mewujudkan Inovasi Daerah. Nilai tambah tersebut, pada akhirnya akan menjadi peningkatan daya saing daerah dan kemudian secara nasional menjadi daya saing nasional.

Penerapan inovasi system pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dirasa cukup efektif dan efisien hal ini terlihat dari diterapkannya *Cash Management system (CMS)* yaitu system pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Bank NTB Syariah, dimana dalam penggunaan Sistem ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pencairan dana yang telah terbit Surat Perintah Pencairan Dananya (SP2D) bisa langsung mencairkan dana tanpa harus membawa SP2D tersebut ke Bank. Pencairan dana secara langsung ke pihak ketiga setelah menyelesaikan pekerjaan cukup efektif dan meminimalisasikan terjadinya politisasi anggaran (Pratiwi, 2010).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian masing-masing dimensi mempunyai total skor yaitu dimensi kebaruan memiliki total skor sebesar 8,382, dimensi produktif memiliki total skor sebesar 8,522, dimensi berdampak memiliki total skor sebesar 8,030, dan indikator berkelanjutan memiliki total skor sebesar 8,397.

Dari hasil perhitungan formula indeks yang di gabungkan dari kedua aspek yaitu aspek output dan aspek outcome yaitu sebesar 83,07 % dengan kriteria Sangat Inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Azwar. 2017. *Inovasi Dan Kolaborasi Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Pemerintah Daerah Banyuwangi. tahun 2017: Halaman 112-125
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- Maggasingang, Djainuddin. 2010. *Kinerja DPRD Bidang Anggaran*. Jurnal Amanah, Vol.1,7,1-12
- Narutomo, Teguh. 2014. *Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014: Halaman 143 – 156.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Pratiwi, Nur Ratih. 2010. *Politisasi Anggaran Sektor Publik*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1 tahun (2010:186-187)
- Suprihartini, Ani, dkk. 2017. *Panduan Pengukuran Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik 2017*. Pusat Inovasi Pelayanan Publik – LAN.